



**TERMINOLOGI BERMAKNA KOLEKTIVITAS PADA NAMA ORGANISASI
DAN INSTITUSI POLITIK DALAM BAHASA ARAB**

***COLLECTIVE SIGNIFICANCE OF TERMINOLOGIES IN THE NAMES OF
POLITICAL ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS IN THE ARABIC LANGUAGE***

Hamdan

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281

Ponsel: 0882006754968; Posel: hamdan@ugm.ac.id

Naskah diterima tanggal: 31 Oktober 2023; Direvisi akhir tanggal: 4 Juli 2023; Disetujui tanggal: 4 Juli 2023
DOI: <https://doi.org/10.26499/mab.v17i1.604>

Abstrak

Artikel ini membahas salah satu aspek penamaan institusi politik, yaitu aspek makna kolektivitas yang dikandungnya. Sumber utama penelitian ini adalah ensiklopedia berbahasa Arab dengan judul *Mausu'ah as-Siyasah* karya 'Abdul-Wahhab al-Kayyaliy. Penelitian dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian. Data dikumpulkan secara kualitatif dalam kartu data dan dianalisis dengan menggunakan referensi berbahasa Arab dengan prinsip analisis komponen makna. Hasil penelitian ini memperlihatkan penamaan institusi politik di kalangan bangsa Arab berakar pada pola makna kolektivitas dengan lima makna dasar, yaitu himpunan, forum, aktivitas, personal, dan analogi. Sebagai contoh adalah kata *majlis* 'majelis' dan *harakah* 'gerakan'. Meskipun keduanya memiliki makna dasar forum dan aktivitas, tetapi dalam penggunaannya merujuk pada makna kolektivitas politik sebagaimana *hizb* 'partai'. Penggunaan nama-nama tersebut menegaskan pemahaman semangat komunal dalam kehidupan bangsa Arab sehari-hari.

Kata kunci: kolektivitas; nama; organisasi politik; institusi politik

Abstract

*This article explores one of the aspects of Arabic political institution naming, i.e., the state of collectivity within. The main source of this article is the Arabic encyclopedia titled *Mausu'ah as-Siyasah* by 'Abdul-Wahhab al-Kayyaliy. The study is conducted in three stages; object selection, analysis, and presentation of results. The data are collected based on qualitative methods in cards and then analyzed using Arabic references with componential analysis of meaning. The result shows that the naming of political institutions among Arabs is rooted in the Arabic mindset of collectivity with five basic meanings; group, forum, activity, personal, and analogy. For examples are *majlis*, 'assembly,' and *barakah*, 'movement.' Even though both have the basic meaning of forum and activity, in their use, they refer to the meaning of political collectivity as *Hizb's* 'party.' The pattern of the names asserts an understanding of communal spirit in the daily life of the Arab community.*

Keywords: *collectivity; name; political organization; political institution*

1. Pendahuluan

Perkembangan ensiklopedia Arab merupakan kelanjutan perkembangan literasi di dunia Arab pada masa Abbasiyah akhir. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhanna dalam Konig dan Woolf (2013) bahwa para penulis pada masa ini merasa perlu menyusun sebuah tulisan sebagai panduan memahami limpahan karya penulis-penulis Arab. Ensiklopedia pada masa ini menjadi pijakan perkembangan perkamusan dunia Arab sesudahnya walaupun terjadi serangan besar oleh Hulagu sehingga mengakhiri dinasti Abbasiyah.

Selanjutnya, Muhanna, dalam Konig dan Woolf (2013), menyatakan bahwa periode dinasti Mamluk (1250-1517 M) di Mesir dan Syria Raya (Levant) dianggap sebagai masa keemasan ensiklopedia Arab. Berbagai karya ensiklopedia pada masa itu bervolume besar dengan tema bervariasi dari berbagai cabang ilmu dalam jumlah halaman mencapai ribuan. Hal ini tidak terlepas dari status sosial para penulis ensiklopedia masa itu yang menduduki posisi tinggi dalam birokrasi pemerintahan dinasti Mamluk. Posisi ini memungkinkan para penulis untuk mendapatkan akses informasi ke seluruh dunia Islam kemudian menuliskannya dalam ensiklopedia.

Secara khusus, van-Berkel dalam Konig dan Woolf (2013) menyoroti penyusunan ensiklopedia Arab pada masa dinasti Mamluk yang menyertakan beberapa sarana untuk membantu para pembaca, seperti referensi, urutan penyajian, daftar isi, dan juga penggunaan alfabet. Dengan demikian, dibandingkan dengan ensiklopedia Arab masa sebelumnya, ensiklopedia Arab masa dinasti Mamluk lebih mudah digunakan. Para penyusun ensiklopedia melakukan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan kelompok pembaca yang lebih banyak seiring bertambahnya melek huruf di dunia Islam.

Van-Ess dalam Endress (2006) menegaskan bahwa sampai masa modern pasca kolonialisme Barat, sistematika penulisan ensiklopedia Arab masa Mamluk menjadi panduan utama penulisan ensiklopedia Arab. Ensiklopedia bertema politik menjadi produk lanjutan pasca kolonialisme Barat seiring dengan kebangkitan Islam di beberapa wilayah Arab. Nama organisasi politik menjadi salahsatu isi utama dalam ensiklopedia politik. Penamaan organisasi politik tersebut terpengaruh oleh proyek ideologis pemerintah masing-masing wilayah.

Ensiklopedia *Mausu'ah as-Siyasah* karya 'Abdul-Wahhab al-Kayyaliy (2015), merupakan salah satu ensiklopedia bahasa Arab terpenting yang disusun oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh ahli ensiklopedia Palestina bernama 'Abdul-Wahhab al-

Kayyaliy. Saat ini, ensiklopedia tersebut sudah memasuki edisi keempat dan terdiri atas dalam tujuh jilid. Nama-nama organisasi politik dalam ensiklopedia ini menjadi gambaran perkembangan konsep politik di dunia Arab pasca kolonialisme melalui semangat kebangkitan melawan penjajahan.

Penerjemahan nama aliran politik bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab dalam *Mausu'ah as-Siyasah* menjadi pembahasan Hamdan (2018). Terjemahan tersebut terbagi dua, yaitu nama yang di-Arab-kan (*ta'rib*) dan nama yang menggunakan padanan dari bahasa Arab. Aspek hermeneutik menjadi landasan dalam penerjemahan ini. Terjemahan yang dihasilkan sebisa mungkin sesuai dengan maksud aslinya dalam bahasa Inggris.

Pembahasan nama institusi politik dari segi makna kebahasaan, sebagaimana yang akan dilakukan terhadap *Mausu'ah as-Siyasah*, didasarkan pada problematika politik itu sendiri. Twardzisz (2018) menyatakan bahwa penamaan lembaga politik telah menjadi isu problematik karena pemahaman terhadap makna yang dikandungnya selalu berkembang tanpa batas, bahkan melampaui batasan makna itu sendiri. Tidak adanya batasan terhadap pemaknaan ini meningkatkan kompleksitas persoalan karena telah mengaburkan konsep kunci yang akhirnya juga mengaburkan makna. Penyusunan definisi yang jelas dengan prinsip-prinsip kebahasaan akan mengurangi kekaburan makna ini sekaligus membantu ahli-ahli lain terlibat dalam perdebatan tentang isu-isu politik.

Al-Kasimi, dalam Alsulaiman dan Allaithy (2019), secara detil menjelaskan perkembangan perkamusan dan penyusunan peristilahan di dunia Arab. Semangat bangsa Arab mendokumentasikan kekayaan bahasanya diwujudkan dengan lebih dari dua ribu kamus dan ensiklopedia mengenai kehidupan bangsa Arab, masa pra-Islam hingga modern, kehidupan Badui pedesaan hingga masyarakat urban perkotaan. Hal yang belum ditemukan justru pembahasan sejarah lengkap bahasa Arab.

Hamed (2014) menyatakan bahwa perkembangan sains dan teknologi menghadapkan bahasa Arab pada persoalan kebahasaan yang serius untuk menampilkan konsep-konsep baru yang belum ada padanannya dalam bahasa Arab. Akibat hegemoni bahasa ini, terutama bahasa Inggris dan Perancis, beberapa ahli di bidang teknologi secara langsung mengambil terminologi dari kedua bahasa ini tersebut. Di sisi lain, ahli-ahli yang lain melakukan standardisasi terhadap terminologi-terminologi tersebut.

Usaha agar tetap mengedapankan khazanah bahasa Arab melalui usaha *Arabicization* menjadi diskusi khusus dalam konteks negara Yordania dilakukan oleh Al-

Ajrami (2015). Upaya *Arabicization* dilakukan pada masa lalu dan sekarang melalui usaha yang dilakukan oleh para linguist Arab. Pembahasan diutamakan pada proses yang dijalankan dan situasi politik yang melingkupinya. Ajrami menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa Arab di kalangan bangsa Arab mengalami kemunduran tidak lepas dari kondisi politik bangsa Arab sendiri. Semangat itu aktif kembali pada akhir abad kesembilanbelas karena kemunduran Turki Usmani, tetapi pendidikan bahasa Arab masih menggunakan buku-buku lama dengan metode yang sulit. Sebaliknya, bahasa asing memiliki metode yang maju dan sangat membantu para pembelajar dalam mengakses ilmu pengetahuan. Tantangan yang lain adalah berdirinya negara Israel sehingga orang Arab menyepelkan Bahasa Arab standard dan lebih mengunggulkan bahasa Arab dialek masing-masing negara, bahkan wilayah. Dalam konteks lain, bahasa Arab diharapkan mampu bertahan dalam perkembangan budaya seiring dengan penggunaannya secara resmi di forum-forum PBB sebagai bahasa pengantar keenam.

Persoalan pengaruh bahasa asing tidak tampak ketika pembahasan dilakukan terhadap terminologi al-Qur'an, walaupun sementara terbatas pada diskusi terkait doktrin ketuhanan. Dalam Alsulaiman dan Allaithy (2019), Allaithy mengeksplorasi hal ini terkait sifat keesaan Tuhan dalam al-Qur'an. Secara umum, bangsa Arab bisa sepakat dengan makna dasar keesaan ini dengan menyisakan perdebatan dalam aspek turunannya. Menurut Daniels, dalam Alsulaiman dan Allaithy (2019), hal ini karena kesatuan pemahaman kebahasaan beserta perbedaan-perbedaannya di kalangan bangsa Arab relatif stabil.

Pengakuan sebagai bagian dari sebuah komunitas Arab dibahas oleh Guellouz (2016) yang mendiskusikan *Tunisianity* dalam konteks Tunisia. Periode pasca revolusi 2011 di Tunisia diwarnai dengan tiga masalah linguistik dalam konteks politik. Ketiga masalah tersebut adalah: penggunaan bahasa Arab standar, penggunaan dialek Tunisia, dan penggunaan bahasa Tamazight yang merupakan bahasa asli bangsa Barbar. Ketiga masalah ini menimbulkan pertanyaan terkait pengakuan seseorang sebagai orang Tunisia dari segi bahasa. Secara historis, masalah bahasa ini juga menjadi masalah bangsa Tunisia pasca kemerdekaan tahun 1968 dan bahasa Arab terpilih sebagai bahasa nasional Tunisia sebagai modal kebanggaan bangsa yang baru saja merdeka, di samping bahasa Perancis yang tetap dipelajari sebagai pintu masuk budaya modern Eropa. Kedua bahasa ini menempatkan bangsa Tunisia dalam posisi sejajar dengan bangsa lain walaupun pada

kenyataannya keduanya adalah bahasa kaum elit Tunisia yang berpendidikan. Pasca masa revolusi, generasi muda Tunisia mendorong penggunaan Bahasa Perancis di fourm-forum resmi dengan alasan tidak adanya larangan hukum, tetapi hal ini mendapat penentangan dari golongan konservatif. Sebaliknya, dorongan penggalakan bahasa Arab standar dipandang membawa Tunisia ke belakang.

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, terutama terkait penamaan. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan aspek tujuan dan objek yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut di antaranya adalah Diana, Mahsun, dan Burhanuddin (2019); Arrozi, Burhanuddin, dan Saharudin (2020); Hilman, Burhanuddin, dan Saharuddin (2020); Syahrawati, Burhanuddin, dan Mahyudin (2022); serta Djuwarijah, Burhanuddin, Johan Mahyudi (2023). Penelitian pertama mengkaji tentang leksikon jender dalam bahasa Sumbawa. Disimpulkan bahwa penghargaan terhadap perempuan menjadi dasar leksikon jender. Hal senada disampaikan oleh penelitian kedua yang mengkaji tentang leksikon pengobatan dalam bahasa Sasak. Dasar penamaan dalam leksikon medis ini adalah keselarasan antara manusia, alam, dan agama, serta kebutuhan ekonomis. Keselarasan lainnya tampak pada penelitian ketiga mengkaji penamaan nama institusi dan lembaga di Kabupaten Sumbawa Barat. Aspek sosial berupa ketuhanan, keselamatan, dan keberanian menjadi panduan utama penamaan institusi dan lembaga tersebut. Dua penelitian terakhir mengkaji tentang penamaan dalam dunia kuliner di Kota Mataram. Bentuk lanskap kuliner berupa penamaan warung, lesehan, restoran, dan dapur, dipengaruhi oleh penggunaan makna konseptual dan konotatif dengan fungsi informatif, identifikatif, dan simbolik.

Ada beberapa hal yang perlu ditegaskan dari kajian-kajian di atas. Penggunaan terminologi politik, yang menjadi fokus utama tulisan ini, melihat kamus sebagai sumber penamaan organisasi politik dalam bahasa Arab, meskipun kajian historisnya lebih dominan. Demikian juga penggunaan terminologi politik sebagai bahan diskusi terkait identitas Arab, belum melihat aspek praktisnya. Tulisan ini akan mendiskusikan aspek praktis tersebut dalam penggunaan nama organisasi dan institusi politik.

2. Landasan Teori

Dalam rangka pembahasan pembahasan nama institusi politik, pembahasan terhadap bentuk dan makna menjadi penting. Kajian terminologi pada dasarnya membahas nama dan proses penamaan yang melibatkan pembahasan mengenai bahasa dan makna. Rey (1995) berpendapat bahwa ketika kata adalah lambang yang merujuk pada leksikon tertentu dalam suatu bidang ilmu dan dianalisis sebagai satu makna tunggal, maka nama menjadi ranah pembahasan semantik. Proses penamaan berjalan dari penentuan objek tanpa nama dan mungkin tidak bisa diberi sebutan, hingga menjadi sebuah nama dengan maknanya sendiri.

Riemer (2010) menunjukkan bahwa pendalaman terhadap aspek makna menjadi bagian penting dalam mendiskusikan nama institusi politik bahasa Arab. Aspek makna ini dibahas dengan dasar teori semantik, yaitu cabang linguistik yang membahas makna dalam unit-unit kebahasaan. Pembahasan makna ini terkait dengan letak makna, relasi antar makna, kombinasi antar makna dalam struktur sintaktis, perbedaan antara makna literal dan nonliteral, hubungan antara makna dengan pikiran dan referen, hubungan makna dengan kata dan konteksnya, perubahan makna, dan ekspresi makna dalam bahasa-bahasa dunia.

Secara umum, Nida (1984) menyatakan bahwa sebuah kata bisa memiliki satu makna utama dengan beberapa makna turunan. Di sisi lain, dalam semua bahasa, beberapa bentuk kata bisa memiliki cara pengucapan yang sama, tetapi memiliki makna-makna yang sama sekali tidak berkaitan. Dalam analisis, kajian etimologi makna menjadi tidak relevan ketika aspek keterkaitan sudah hilang.

Nida (1984) melanjutkan bahwa satu lagi aspek kebahasaan yang membuat kajian makna menjadi lebih rumit yaitu bahwa makna khusus sebuah kata mungkin saja mengandung beberapa tingkatan referen, yaitu objek yang menjadi acuan. Dari sini disimpulkan bahwa bahasa natural, berbeda dengan bahasa matematika atau logika, menjadi sangat tidak efisien. Harapan agar satu kata menjadi simbol dari satu objek sangat sulit dipraktekkan setidaknya dengan dua alasan. Pertama, sangat tidak mungkin seseorang mempelajari bahasa dengan jutaan kata untuk masing-masing objek. Kedua, tidak dimungkinkan adanya kreativitas dalam penggunaan bahasa figuratif untuk mengungkapkan dimensi estetik dan konseptual dari pengalaman.

Nida (1984) menganjurkan pendekatan analisis komponen makna ketika satu kata memiliki makna yang berbeda-beda, di sisi lain, ada beberapa kata yang berbeda justru memiliki makna yang berkaitan. Secara faktual, makna-makna dalam kata-kata tersebut justru lebih berhubungan daripada makna-makna dalam satu kata. Hubungan makna antara kata-kata yang berbeda tersebut menjadi fokus pendekatan dalam kajian semantik.

Disarankan oleh Nida (1984) untuk menemukan kontras dalam rangka menemukan makna kebahasaan karena tidak ada makna yang terpisah dari perbedaan-perbedaan signifikan. Faktor penentu perbedaan setiap bentuk kebahasaan dengan yang lain disebut komponen-komponen diagnostik (*diagnostic components*). Dalam beberapa kasus, komponen diagnostik tidak serta merta muncul, tetapi terdapat dalam hubungan internal beraturan (*internal relations of order*) dengan makna temporal dan logis sebagai bentuk yang paling umum.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Sumber data penelitian ini adalah data pustaka berupa terminologi politik di dalam *Mausu'ah as-Siyasah* (2015) yang merupakan nama lembaga dan organisasi politik. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan cara mencatat terminologi politik pada ensiklopedia ini dalam kartu data dan diberi tanda tertentu. Terminologi tersebut diklasifikasikan untuk mendapatkan terminologi yang menunjukkan ideologi politik sebagai latar belakang pembentukannya.

Data dianalisis menggunakan bahan kepustakaan bahasa Arab dengan prinsip morfologi Arab. Pembahasan dilanjutkan pada tataran makna secara semantik dengan prinsip medan makna kebahasaan. Dalam penelitian ini, medan makna tersebut difokuskan pada terminologi politik sebagai wujud literal ideologi dan dikaitkan dengan dinamika politik dalam pembentukannya.

Hasil analisis data akan disampaikan secara informal dalam bentuk laporan penelitian yang secara praktis berbentuk rancangan artikel jurnal. Dengan cara ini, hasil analisis data sebagai hasil penelitian dapat disampaikan secara sistematis dan ilmiah ke khalayak masyarakat ilmiah.

4. Pembahasan

4.1 Penamaan dengan makna dasar himpunan

Makna himpunan sebagai nama institusi politik dalam bahasa Arab diwakili oleh kata *jam'iyah*, *hizb*, *katlah* dan *munazhzhamah*. Secara semantik, keempat kata tersebut menggambarkan sebuah status semantik berupa kolektivitas. Keempat kata tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks tuturan, tetapi makna kolektivitas tetap saja dominan (Glanville, 2018). Secara lengkap, makna keempat kata tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) *Jam'iyah*

Istilah politik ini mengandung pengertian secara umum terhadap kumpulan orang untuk mempertahankan kepentingan bersama atau mewujudkan ide bersama dengan batasan tertentu dan jelas (al-Kayyaliy, 2015). *Mausu'ah as-Siyasah* secara khusus memberikan beberapa contoh penggunaan terminologi *jam'iyah* sebagai nama organisasi politik. Terminologi ini digunakan untuk nama perkumpulan dengan anggota individu-individu yang memiliki ciri tertentu. *Mausu'ah as-Siyasah* memberikan contoh dengan dua nama, yaitu: *Jam'iyah al-'Ulama' al-Muslimin fil-Jazaa'ir* dan *Jam'iyah al-Fataat al-'Arabiyyah*.

Jam'iyah al-'Ulama' al-Muslimin fil-Jazaa'ir (Asosiasi Cendekiawan Muslim Aljazair) adalah asosiasi Islam Aljazair yang didirikan oleh sekelompok cendekiawan Aljazair pada tahun 1931. Organisasi ini menetapkan tujuan untuk meningkatkan derajat rakyat Aljazair, memperbaiki keadaan masyarakat, menumbuhkan nilai-nilai dan etika Islam yang luhur, dan menjaga identitas bangsa Aljazair dalam rangka mengambil posisi terdepan di dunia sesuai dengan identitas Islam dan Arab. Adapun *Jam'iyah al-Fataat al-'Arabiyyah* (Asosiasi Pemuda Arab) adalah asosiasi politik nasionalis Arab rahasia yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa Arab di Paris tahun 1911. Asosiasi ini memengaruhi pemikiran nasionalis Arab dan membuka jalan bagi Konferensi Arab di Paris tahun 1913. Para mahasiswa nasionalis ini berkontribusi pada persiapan Revolusi Arab yang dimulai di Hijaz tahun 1916 (al-Kayyaliy, 2015).

2) *Hizb*

Pengertian kata *hizb* mengacu pada sekelompok warganegara yang memegang tujuan-tujuan politik dan ideologis bersama dan mereka mempersiapkan dirinya agar bisa memegang kekuasaan dalam rangka mewujudkan cita-citanya (al-Kayyaliy, 2015). Penggunaan kata *hizb* sebagai sebuah kolektivitas bersifat politis dalam sejarah bangsa Arab memiliki penggunaan yang paling banyak. Ratusan partai dengan berbagai aliran (nasionalis, sosialis, marxis, dan agama), didirikan oleh bangsa Arab dalam rangka memenuhi agenda politiknya yang ingin membebaskan diri dari penjajahan. Sebagai contoh adalah *Hizb at-Tahrir al-Islamiy* dan *Hizb at-Tahrir al-Isytirakiy*.

Hizb at-Tahrir al-Islamiy (Partai Pembebasan Islam) adalah partai kanan berbasis agama yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada awal tahun 1950-an di Yordania. Partai ini didirikan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bangsa Arab sekaligus menandingi pengaruh Ikhwanul Muslimin. Secara tegas, partai ini menyerukan pelaksanaan agama Islam pada urusan agama dan negara. Gerakan berbeda dilakukan oleh *Hizb al-Ummah al-Isytirakiy* (Partai Nasional Sosialis) yang digagas oleh Shalih Jabbar tahun 1951 di Irak sebagai reaksi terhadap pengaruh kapitalisme (al-Kayyaliy, 2015).

3) *Katlah*

Pengertian *katlah* merujuk pada strategi politik dengan ikutsertanya beberapa negara dengan agenda yang sama dalam bidang politik, pertahanan, dan perdagangan. Dalam beberapa kasus, strategi ini dilakukan sekelompok negara dalam rangka menghadapi ancaman dari kelompok negara yang lain (al-Kayyaliy, 2015).

Penggunaan kata *katlah* sebagai nama gerakan politik memiliki jumlah penggunaan paling sedikit karena *katlah* adalah gabungan beberapa kelompok politik. Sebagai contoh adalah *Al-Katlah al-Wataniyyah* (Blok Nasional) yang pernah berdiri di Syria, Lebanon, Palestina, dan Maroko. Blok Nasional di Syria dianggap sebagai blok terpenting karena memiliki peran memperkenalkan paham nasionalisme di dunia Arab. Blok ini didirikan melalui kongres pada tahun 1927 dengan cabang-cabang di kota Damaskus, Homs, Hamah, dan Aleppo. Kelompok yang menggabungkan diri dalam blok ini adalah Partai Kemerdekaan (*Hizb al-Istiqlal*), Partai Kebangsaan (*Hizb asy-Sya'b*), Partai Nasional Demokrat (*al-Hizb al-Wathaniy ad-Dimuqrathiy*), beberapa keluarga terpandang, pemuka suku, dan kelompok borjuis perdagangan (al-Kayyaliy, 2015).

4) *Munazhzhamah*

Istilah ini menunjuk pada kelompok terstruktur dengan tujuan-tujuan terbatas pada bidang-bidang tertentu dilengkapi dengan prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan pelaksanaannya (al-Kayyaliy, 2015). Kata *munazhzhamah* sebagai istilah politik baru digunakan di dunia Arab pasca penjajahan Barat setelah bersentuhannya bangsa Arab dengan prinsip-prinsip organisasi politik. Sebagai contoh penggunaan adalah *Munazhzhamah at-Tahrir al-Filisthiniyyah*.

Pendirian organisasi *Munazhzhamah at-Tahrir al-Filisthiniyyah* (Organisasi Pembebasan Palestina) merupakan ide yang dilontarkan oleh Presiden Gamal Abdel Naser dari Mesir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Arab di Kairo tanggal 13 Januari 1964. Ide ini muncul seiring dengan semakin intensifnya penguasaan Israel atas wilayah-wilayah Palestina dan munculnya pemikiran perlunya kemandirian bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Konferensi Kairo kemudian memberikan mandat kepada wakil Palestina, yaitu Ahmad asy-Syaqiriy, untuk mengajak pemimpin-pemimpin kelompok rakyat Palestina membentuk organisasi dengan tujuan membebaskan Palestina dan merumuskan langkah-langkah pelaksanaannya. Organisasi ini kemudian resmi berdiri pada tanggal 2 September 1964 melalui Konferensi Palestina di Yerusalem pada tanggal yang sama dengan dukungan dari Raja Hussein dari Yordania (al-Kayyaliy, 2015).

4.2 Penamaan dengan makna forum

Pemahaman terhadap forum pada tulisan ini adalah kegiatan yang melibatkan banyak anggota organisasi politik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik. Forum seperti ini bagi bangsa Arab adalah area bersama dan menjadi tempat berkumpul dengan menjunjung tinggi kesetaraan. Beberapa kata yang dijadikan sebagai nama forum politik dalam *Mausu'ah as-Siyasah* adalah *majlis*, *mu'tamar*, *lajnah*, dan *nadi*.

1) *Majlis*

Istilah *majlis* merujuk pada tempat berkumpulnya para anggota perwakilan kelompok-kelompok politik di masyarakat. Secara etimologis, kata *majlis* menunjuk kepada tempat berkumpul, artinya bersifat lokatif. Akan tetapi, secara simbolik dan lebih banyak dipakai, kata *majlis* kadang menunjukkan makna referensial kepada tujuan atau anggota *majlis* itu

sendiri (al-Yasu'i, 2015: 98). *Mausu'ah as-Siyasah* menunjukkan kedua makna simbolik melalui dua organisasi, yaitu *Majlis at-Ta'awun al-Khalijiy* dan *Majlis al-Wathaniy al-Filisthiny*.

Majlis at-Ta'awun al-Khalijiy (Majlis Kerjasama Teluk/Gulf Cooperation Council) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1981 beranggotakan Arab Saudi, Kuwait, Oman, UAE, Qatar, dan Bahrain. Prinsip organisasi ini dirumuskan dalam konferensi Abu Dhabi di tahun tersebut dengan menegaskan kesejahteraan negara-negara anggota sebagai tujuan utama disertai langkah-langkah implementasi. Penanganan masalah-masalah negara anggota dilakukan dengan membentuk tiga kantor perwakilan, yaitu Kuwait untuk masalah ekonomi, Riyadh untuk masalah keamanan, dan Manama untuk pangkalan operasi Selat Hormuz (al-Kayyaliy, 2015).

Pemaknaan simbolik *majlis* kepada anggotanya ditunjukkan oleh *Mausu'ah as-Siyasah* melalui *al-Majlis al-Wathaniy al-Filisthiny* (Majelis Nasional Palestina). Anggota majelis ini adalah anggota-anggota utama masyarakat Palestina. Majelis ini adalah badan tertinggi dalam *Munazhzhamah at-Tahrir al-Filisthinyyah* (Organisasi Pembebasan Palestina) dengan kewenangan menyusun perundang-undangan dan aturan turunannya. Pelaksanaan hasil-hasil keputusan majelis ini diserahkan kepada Dewan Eksekutif (*al-Lajnah at-Tanfidziyyah*) yang merupakan badan lain di *Munazhzhamah at-Tahrir al-Filisthinyyah* (al-Kayyaliy, 2015).

2) *Mu'tamar*

Pengertian *muktamar* mengacu pada pertemuan para pemimpin wilayah atau perwakilan masyarakat untuk membicarakan persoalan bersama, baik politik, sosial, ekonomi, bahkan peperangan (al-Kayyaliy, 2015). Forum politik yang disebut sebagai *mu'tamar* mengindikasikan kepesertaan yang bersifat perwakilan.

Sebagai contoh adalah *al-Mu'tamar al-'Arabiyy* (Konferensi Arab). Forum ini dilaksanakan pada tahun 1913 di Paris dengan tujuan membebaskan bangsa Arab dari kekuasaan Turki Usmani. Dalam forum ini, hadir perwakilan bangsa Arab dari wilayah Arab, Turki, ataupun diaspora. Di wilayah-wilayah ini, mereka mendirikan berbagai organisasi, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Pemerintah Turki Usmani merespon hasil forum ini dengan mengizinkan pendirian organisasi-organisasi politik

Arab tetapi tidak diizinkan duduk dalam struktur pemerintahan Utsmani (al-Kayyaliy, 2015).

3) *Lajnah*

Pertemuan sekelompok orang untuk membicarakan satu masalah dan mencapai kesepakatan menjadi pemahaman dasar istilah *lajnah* (al-Yasu'i, 2015). *Lajnah* sebagai forum dengan agenda politik mengandung pengertian sebuah forum kecil. Sebagai contoh adalah *Lajnah Tahrir al-Maghrib al-'Arabiyy*. (Komite Kemerdekaan Arab Maroko) yang didirikan tahun 1947 oleh 'Abdul-Karim al-Khithabiy. Tujuan utama pendirian forum ini adalah menghimpun semua kekuatan di wilayah Maroko, Tunisia, dan Aljazair dalam rangka merebut kemerdekaan dan mendirikan negara dengan dasar-dasar Islam dan budaya Arab serta menolak kesetaraan apapun dengan para penjajah (al-Kayyaliy, 2015).

4) *Nadi*

Pemahaman *nadi* mengindikasikan pertemuan rutin oleh kelompok masyarakat yang dilakukan secara rutin (al-Yasu'i, 2015). *Nadi* pada awalnya adalah forum perkumpulan anggota komunitas dalam budaya Arab. Pengertian ini kemudian dilanjutkan dalam tataran kenegaraan seperti *An-Nadi ats-Tsaqafiy al-'Arabiyy* (Pusat Budaya Arab/*Arab Cultural Center*) didirikan di Beirut, Lebanon, tahun 1944, atas prakarsa mahasiswa Universitas Amerika di Beirut. Para pemrakarsa ini terpengaruh dengan pemikiran nasionalisme Arab, terutama Dr. Costantine Zuraiq. Kegiatan budaya utama organisasi adalah pameran buku yang pada tahun 1956 yang merupakan pameran buku pertama di dunia Arab. Kegiatan yang lainnya adalah konser musik tahun 1980 dengan mendatangkan maestro Salim Sahab (al-Kayyaliy, 2015).

4.3 Penamaan dengan makna aktivitas

Aktivitas yang dimaksud pada tulisan ini adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Organisasi politik kemudian dipersonifikasikan melakukan aktivitas tersebut dan kemudian secara simbolik dijadikan nama organisasi. Dua kata yang umum sebagai nama dengan jenis ini adalah *harakah* dan *hiwar*. Gerakan umum oleh kelompok-kelompok tertentu dalam satu barisan dengan tujuan yang sama yaitu perbaikan kondisi ekonomi, sosial, atau politik menjadi pemahaman istilah *harakah*. Adapun pemahaman

hiwar mengacu pada pembicaraan suatu kelompok masyarakat dalam dialog dengan ditandai adanya pernyataan, pertanyaan, dan jawaban (al-Yasu'i, 2015).

Sebagai contoh penggunaan kata *harakah* sebagai nama organisasi politik bangsa Arab adalah *Harakah at-Tahrir al-Filisthiniy* (Gerakan Kemerdekaan Palestina) atau *Fath* ini didirikan tahun 1955 dalam rangka melawan penjajahan Israel secara rahasia. Nama organisasi ini disingkat menjadi *Fath* yang merupakan kebalikan huruf-huruf awal nama resmi organisasi, yaitu *h*, *t*, dan *f*. Baru pada tahun 1965, *Fath* secara terbuka menyatakan diri bersamaan dengan peluncuran sayap militernya. *Fath* dianggap sebagai organisasi perlawanan Palestina terbesar karena bisa menghimpun banyak kelompok masyarakat Palestina dan menjadi penghubung bangsa Palestina dengan negara-negara lain. Gerakan ini hanya menghindari gerakan kiri untuk menjaga citra dalam pergaulannya dengan bangsa Arab lainnya (al-Kayyaliy, 2015).

Kata *hiwar* yang bertransformasi menjadi sebuah organisasi politik sebagaimana digunakan pada *Al-Hiwar al-'Arabiyy – al-Urubiy* (Dialog Arab - Eropa). Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 setelah Perang Oktober antara Arab dan Israel dalam rangka mengatasi krisis akibat peperangan tersebut. Tujuan lain pendirian lembaga ini adalah menegaskan posisi politik masing-masing negara dalam konflik Arab-Israel. Inisiatif pendirian lembaga ini berasal dari anggota negara Masyarakat Ekonomi Eropa yang melihat bahaya ekonomi secara global akibat konflik di Timur Tengah (al-Kayyaliy, 2015).

4.4 Penamaan dengan makna personal

Yang dimaksudkan dengan personal di sini adalah individu-individu yang mendapat mandat untuk menduduki posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Ketika secara kolektif mereka bergabung dalam sebuah organ politik, maka sebutan untuk mereka juga dijadikan nama institusi. Dua kata yang umum dipakai adalah *dlubath* (komandan) dan *thali'ah* (perintis). *Dlubath* merujuk adalah bentuk jamak dari *dlabith* yang mengandung arti kepala satuan petugas negara, sedangkan *thali'ah* adalah regu perintis dalam organisasi ketentaraan (al-Yasu'i, 2015).

Sebagai gambaran lanjut, diketengahkan organisasi dengan menggunakan nama *dlubath*, yaitu *Adl-Dlubath al-Ahrar fi Mishr* (Para Komandan Pembebasan Mesir). Organisasi ini berdiri di kalangan anggota militer Mesir tahun 1949 dengan anggota

sejumlah 250 komandan. Pada tahun 1952, mereka mengadakan revolusi dan menurunkan Raja Farouq kemudian menggantinya dengan sistem republik. Kelompok ini memiliki peran besar dalam dinamika perpolitikan Mesir bahkan menjadi pendorong utama Mesir bergabung dengan Organisasi Negara Non-Blok (al-Kayyaliy, 2015).

Nama *thali'ah* sebagai salah satu organ dalam sistem ketentaraan misalnya dipakai dalam *Thali'ah al-Istirakiyyin* (Peleton Sosialisme). Institusi ini didirikan oleh Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir tahun 1963 dengan tujuan menjadi pelopor utama penggabungan masyarakat Mesir dalam kesatuan sosialisme. Gamal Abdel Nasser memilih orang-orang terdekatnya untuk menjamin keberhasilan program tersebut. Dalam perjalanannya, institusi ini memiliki peran terbatas sebagai lembaga analisis kebijakan dan memberikan usulan tanpa bisa mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Lembaga ini kemudian ditutup pada tahun 1971 oleh Presiden Anwar Sadat (al-Kayyaliy, 2015).

4.4 Penamaan dengan analogi

Rujukan penggunaan analogi dalam penamaan organisasi adalah alat utama yang sering digunakan dalam berjalannya roda organisasi. Ada dua alat utama yang sering digunakan sebagai rujukan nama organisasi, yaitu *liwa'* (bendera) dan *shundug* (kotak). Secara umum, pengertian *liwa'* adalah bendera penanda pasukan, sedangkan *shundug* merupakan wadah berbentuk kubus atau balok dari kayu atau logam (al-Yasu'i, 2015).

Bendera yang biasanya digunakan sebagai penanda ini kemudian secara analogis digunakan untuk nama organisasi, seperti *al-Liwa' al-Abyadl* (Bendera Putih). Organisasi ini adalah organisasi rahasia dari Sudan dengan tujuan membangun kesadaran nasional dan mempersatukan semua wilayah lembah sungai Nil. Organisasi ini berdiri tahun 1924 di Khartoum, Sudan, dan memulai kampanye politiknya secara terang-terangan melalui kerjasama dengan organisasi serupa di Mesir (al-Kayyaliy, 2015).

Kata *shundug* yang mengandung makna kotak simpanan digunakan sebagai nama organisasi dengan tujuan ekonomi, misalnya *ash-Shundug al-Kuwaity lit-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah al-'Arabiyyah* (Perbendaharaan Kuwait untuk Pengembangan Ekonomi Arab). Organisasi ini merupakan organisasi resmi pemerintah Kuwait yang berdiri tahun 1961. Tujuan utama organisasi ini adalah mengembangkan ekonomi negara-negara Arab, dan juga negara-negara berkembang, dengan menyediakan program pinjaman. Kekayaan

ini telah berkembang dari 200 juta dinar menjadi satu milyar dinar pada tahun 1974 (al-Kayyaliy, 2015).

5. Penutup

Artikel ini bertujuan mengungkap aspek makna kolektivitas yang terkandung dalam nama-nama organisasi dan institusi bahasa Arab sebagaimana ditemukan dalam *Mausu'ah as-Siyasah* karya 'Abdul-Wahhab al-Kayyaliy. Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa nama-nama organisasi dan institusi politik di dunia Arab terkait dengan kebutuhan kesatuan politik dalam mencapai tujuan. Masing-masing kelompok menjadikan nama-nama organisasi dan institusi politik dengan sebuah ciri tertentu, baik sifat individual maupun konseptual, sebagai ciri kelompok yang berbeda satu dengan yang lain. Penggunaan aspek makna yang digunakan juga beragam, baik berupa makna dasar kolektivitas itu sendiri, makna forum, aktivitas, personal, maupun melalui analogi. Kelima ciri inilah yang secara umum ditemukan dalam nama-nama organisasi berbahasa Arab.

Keterangan tambahan:

Artikel ini merupakan bagian laporan penelitian Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, dengan kontrak nomor: 1615/UN1.FIB /UP2M/2019

Daftar Pustaka

- Al-Ajrani, M. A.-S. S. (2015). The Dilemma of Arabicization in the Arab World: Problems and Solutions. *Theory and Practice in Language Studies*, 5(10), 1989. <https://doi.org/10.17507/tpls.0510.03>
- Alsulaiman dan Allaithy, Abied dan Ahmed. (2019). *Handbook of Terminology Volume 2: Terminology in the Arab World*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
- Arrozi, P., Burhanuddin, N., & Saharudin, N. (2020). Leksikon Etnomedisin dalam Pengobatan Tradisional Sasak: Kajian Antropolinguistik. *MABASAN*, 14(1), 17–30. <https://doi.org/10.26499/mab.v14i1.308>
- Diana, Mahsun, dan Burhanudin. Jumianti (2019). Gender dalam bahasa Samawa: Tinjauan Antropolinguistik. *Basastra Vol. 8, No. 1* (2019) hal. 12 – 28.
- Djuwarijah, S., Sukri, & Burhanuddin. (2023). Linguistic Landscape of Ayam Taliwang. dalam *Proceedings of the 3rd Annual Conference of Education and Social Sciences (ACCESS 2021)* (pp. 232–240). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-21-3_26
- Endress, Gerhard. (2006). *Organizing Knowledge: Encyclopaedic Activities in the Pre-Eighteenth Islamic Century Islamic World*. Brill: Leiden, Boston
- Guellouz, M. (2016). The Sociolinguistic Construction of “Tunisianity” through Sociolinguistic Practices from the Tunisian Independence to 2016. *Journal of Arabic and Islamic Studies* 16 (2016): 290-298.
- Hamdan. (2018). Penerjemahan Inggris-Arab Nama Aliran Politik: Studi Kasus pada Mousu’ah as-Siyasah Karya Abdul-Wahhab al-Kayyaliy. *CMES*, 203–217.
- Hamed, F. Y. (2014). *Language Tension, Terminology Variation and Terminology Policy in the Arabic-Speaking North*. disertasi Kent State University
- Hilman, Burhanuddin, dan Saharudin. Aryanah. (2020). Wujud Kebudayaan dalam Tradisi Suna Ro Ndosu: Kajian Etnolinguistik. *Basastra* Desember 2020 9 (3): 255-270.
- Jason Konig and Greg Woolf. (2013). *Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance*. London: Cambridge University Press
- John Glanville, P. (2018). *The Lexical Semantics of the Arabic Verb*. London: Oxford University Press
- al-Kayyaliy, A.-W. (2015). *Mausu’ah as-Siyasah*. Beirut: Al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah Lin-Nasyr Wad-Dirasah.

Nida, E. A. (1984). *Componential Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structure*. Paris: The Hague.

Rey, A. (1995). *Essays on Terminology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Riemer, N. (2010). *Introducing Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press

Syahrawati, C., & Mahyudi, J. (2022). Lanskap Bahasa Indonesia pada Penamaan Tempat Makan dan Minum di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. *Basastra* Vol. 11, No.1-2022

Twardzisz, P. (2018). *Defining "Eastern Europe": A Semantic Inquiry into Political Terminology*. Springer International Publishing

al-Yasu'i, L. M. (2015). *Al-Munjid fil-Lughah wal-Adab*. Kairo: Darusy-Syuruq